



PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA KANTOR PEMERINTAHAN KOTA AMBON

Oleh

Nurida Saimima¹⁾ & Moh. Subchan Mardan²⁾

^{1,2}STIA Abdul Aziz Kataloka

Email: ¹nuridasaimima05@gmail.com & ²shullmardan@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Ambon. Di lingkungan Pemkot Ambon, penduduknya adalah kepala dinas dan kepala seksi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Metodologi pengambilan sampel yang digunakan adalah metode kualitatif dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, yaitu pengumpulan data dengan menyebarkan wawancara kepada responden. Informasi tersebut diperoleh melalui penyebaran 30 wawancara kepada pegawai yang membuat dan menyusun Laporan Akuntabilitas dan Kinerja pada Kantor Pemerintah Kota Ambon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Ambon, komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kota Ambon.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manajemen, Akuntabilitas, Kinerja.

PENDAHULUAN

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik semakin meningkat di era modern, yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya guna memenuhi tuntutan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja, pemerintah harus menerapkan sistem pengukuran kinerja. Kinerja sistem pemantauan memberikan informasi yang signifikan, terutama tentang pencapaian bisnis berdasarkan tujuan yang ditetapkan (Gao, 2015). Dari segi akuntabilitas, jika pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat dilaksanakan dengan benar oleh pemerintah kepada masyarakat, maka akan menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sehingga masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dengan baik. Dalam hal transparansi, jika pemerintah menyampaikan informasi yang menjadi hak rakyat secara transparan, maka akan menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sehingga menghasilkan kinerja pemerintah yang baik (Auditya, Husaini and Lismawati,

2013). Pemerintah pada akhirnya akan dapat memberikan masukan pemahaman kepada masyarakat sebagai hasil dari terwujudnya akuntabilitas sehingga masyarakat akan mempersepsikan bahwa kinerja pemerintah baik. Dengan demikian, penerapan sistem pengukuran kinerja diharapkan berhasil meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara transparan, membantu alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, serta mencapai akuntabilitas publik. Namun, penerapan sistem pengukuran kinerja saja tidak cukup untuk meningkatkan kinerja pemerintah; Partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat sebagai konsumen akhir dari informasi kerja yang disediakan oleh sistem pengukuran kinerja yang diterapkan sangat diperlukan (Nurviasari, 2016).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus konsisten memberikan kinerja yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk selalu tanggap terhadap tuntutan lingkungan dengan memberikan pelayanan terbaik secara



transparan dan akuntabel. Akuntabilitas terkait langsung dengan instrumen kontrol, khususnya dalam hal mencapai hasil dalam pelayanan publik dan mengkomunikasikannya secara terbuka kepada publik. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Negara (LAN) No. 589/IX/6/Y/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah dimutakhirkan dengan SK LAN No. 239/IX/6/8/2003, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas. Penilaian dilakukan secara terbuka, metodis, dan akuntabel melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas adalah persyaratan untuk mempertanggungjawabkan berhasil atau tidaknya misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara berkala (Sedarmayanti, 2003). Sedangkan konsep akuntabilitas kinerja merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mempertanggungjawabkan semua capaian dan kegagalan dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui proses formal, namun bukan satu-satunya.

Kemampuan mengelola organisasi untuk mencapai tujuannya sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Manajemen, sebagai sarana pengorganisasian, dapat diartikan sebagai seni menyelesaikan sesuatu melalui orang. Tata kelola organisasi yang baik akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Manajer membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan namun informasi yang diperlukan akan bervariasi tergantung pada tugas. Jangka waktu, tingkat ketidakpastian, jenis informasi, landasan permintaan informasi, dan gaya pelaporan semuanya berkontribusi pada perbedaan ini. Agar dapat diklasifikasikan, informasi merupakan salah satu kategori utama sumber daya dan termasuk dalam kategori sumber daya konseptual. Jenis desain, implementasi,

dan pengoperasian SIM semuanya mahal dan rumit. Salah satu penyebab kompleksitas ini adalah munculnya peraturan pemerintah sebagai sistem berbasis komputer yang memberikan informasi kepada beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama (Wijoyo, 2021).

Menurut (Cavalluzzo and Itner, 2004) ada berbagai hal yang bisa Sistem informasi manajemen berdampak pada akuntabilitas kinerja. Kegagalan dan keberhasilan suatu organisasi dapat tercermin dari seberapa baik informasi yang diberikan terhadap kinerja perusahaan. Hal ini akan berdampak pada sistem informasi manajemen, oleh karena itu perusahaan dengan sistem informasi manajemen yang kuat dalam mengambil keputusan sehingga program kegiatan yang dilaksanakan di instansi pemerintah berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan mendapatkan keuntungan. Keberhasilan sistem informasi manajemen ditentukan oleh bagaimana sistem dioperasikan dan bagaimana teknologi digunakan. Sistem informasi manajemen akan memengaruhi bagaimana bisnis membuat pilihan, merencanakan, dan mengelola semua aspek operasinya, baik di sektor komersial maupun pemerintahan (Goodhue, 1995). Untuk mencapai hasil yang diinginkan, upaya pemerintah untuk mengembangkan organisasi berkinerja tinggi memerlukan komitmen manajerial tingkat tinggi dari kepemimpinan dan tenaga kerja. Menurut (Nurkhamid, 2008) bahwa Sistem informasi Manajemen adalah keyakinan dan dukungan kuat dari manajemen untuk menjalankan, dan menerapkan suatu kebijakan yang disepakati secara kolaboratif sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat terpenuhi. Akibatnya, bisnis harus memiliki komitmen manajemen yang kuat untuk mempromosikan tanggung jawab kinerja dan memanfaatkan informasi kinerja dengan sangat baik.

Penulis berharap dapat melakukan penelitian yang terfokus pada sistem informasi manajemen mempengaruhi akuntabilitas kinerja di pemerintah Kota Ambon dalam penelitian ini. Sistem informasi manajemen

adalah salah satu faktor tersebut. Rumusan masalah dapat dibuat berdasarkan uraian dari latar belakang kesulitan yang ditunjukkan di atas, yaitu apakah sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja dinas Pemerintah Kota Ambon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara eksperimental pengaruh sistem informasi manajemen terhadap akuntabilitas kinerja di pemerintah Kota Ambon.

LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Manajemen

Administrasi ini mempekerjakan perangkat keras dan perangkat lunak komputer, prosedur panduan, model manajemen dan keputusan, dan database. Manajemen sistem informasi digambarkan sebagai struktur piramida, dengan lapisan dasar yang terdiri dari informasi untuk pemrosesan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan kedua terdiri dari sumber informasi internal yang mendukung operasi manajemen sehari-hari; lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi yang mendukung perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk manajemen pengendalian; dan lapisan atas terdiri dari sumber daya informasi yang mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan manajer tingkat atas. Dengan demikian, telah diuraikan kerangka pemikiran sistem informasi manajemen, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai berikut oleh (Moekijat, 2005) : "Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disatukan bila diperlukan, dengan maksud menyediakan pengelolaan sewaktu-waktu diperlukan, baik data yang bersifat internal maupun eksternal." Sistem informasi manajemen adalah sistem manusia/mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Selanjutnya, menurut (McLeod Jr and Schell, 2001) mendefinisikan SIM adalah sistem berbasis komputer, jaringan lain yang dapat

menyediakan informasi bagi banyak pengguna untuk mendukung fungsi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan.". Sistem informasi manajemen (SIM) adalah jaringan informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya pengambilan keputusan. "MIS adalah metode pengelolaan informasi bekerja melalui penggunaan pendekatan sistem berdasarkan prinsip-prinsip manajemen."

Kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh berbagai elemen selama penerapan Sistem Informasi Manajemen, termasuk masalah teknologi, operasional, dan ekonomi. Menurut Sutanta (2003), setiap perusahaan memiliki sistem untuk mengumpulkan dan memelihara data, dan sebagian besar struktur organisasi organisasi berisi unit sistem informasi manajemen yang bertanggung jawab atas berbagai tindakan yang terkait dengan kinerja karyawan (Rizan Machmud, 2013).

B. Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong terciptanya dan dilaksanakannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, tertib, dan efektif. Penggunaan sistem ini diupayakan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara efisien, efektif, bertanggung jawab, dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Menurut Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Tata Usaha Negara (LAN), pelaksanaan AKIP harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan lembaga dan seluruh jajarannya,
2. Berdasarkan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh,



5. Jujur, objektif, transparan, dan akurat, dan
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai prinsip-prinsip tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari organisasi yang memiliki kewenangan untuk penerapan sistem akuntabilitas guna meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan tanggung jawab di bidang pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu susunan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang terdiri dari tahapan: perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja untuk peningkatan kinerja secara berkelanjutan (Wijoyo, 2021). Akuntabilitas digambarkan dalam birokrasi pemerintahan sebagai keharusan pejabat pemerintah untuk bertindak sebagai penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijakan yang telah ditentukan. Dalam arti yang lebih luas, akuntabilitas publik memerlukan institusi publik dan birokrat yang mengendalikan beragam harapan dari dalam dan luar organisasi. Akibatnya, prinsip akuntabilitas akan muncul secara efektif dalam lingkungan birokrasi yang menekankan komitmen sebagai landasan tanggung jawab. Menurut (Krina and Lalolo, 2003), akuntabilitas adalah pengertian yang menjamin setiap tindakan pelaksanaan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh aktor kepada pihak yang terkena dampak implementasi kebijakan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik atas setiap tindakan yang dilakukan. Implementasi akuntabilitas pada dasarnya memiliki dua tujuan utama. Pertama, tujuan politik, khususnya akuntabilitas, merupakan alat untuk mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, tujuan operasional (operational purpose), yaitu akuntabilitas, merupakan mekanisme yang membantu memastikan bahwa pemerintah berjalan secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas kinerja personel dalam suatu instansi dapat membantu membangun kepercayaan publik dan profesionalisme .

Peningkatan akuntabilitas manajemen akan membentuk profesionalisme manajemen dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas juga berdampak pada kinerja. Akuntabilitas manajemen memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kinerja pemerintah (Noor, . and Muttaqin, 2018). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Badan Tata Usaha Negara Nomor 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyiapan Instansi Pemerintah. Pelaporan Evaluasi Kinerja, kinerja merupakan pernyataan besaran pencapaian dalam melaksanakan sesuatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Maksud dari istilah ini adalah kinerja memberikan gambaran tentang tingkat pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dengan kata lain, kinerja dapat diukur dari tingkat pencapaian implementasi program terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi (Rizan Machmud, 2013).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:9), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek ilmiah (sebagai lawan eksperimen), dimana peneliti merupakan instrumen kunci dari teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi. (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Wawancara terstruktur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. "Purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil orang-orang yang benar-benar



dipilih oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut. Penelitian deskriptif menyelidiki masalah menggunakan fakta terkini dari suatu populasi. Pegawai Kantor Pemerintah Kota Ambon menjadi subyek penelitian ini. Sampel yang terdiri dari 50 orang merupakan bagian dari populasi yang mewakili seluruh populasi. Strategi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer untuk penelitian ini dikumpulkan langsung dari personel Kantor Pemerintah Kota Ambon. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian Berdasarkan tabel di atas, sistem informasi memiliki arah yang positif terhadap akuntabilitas kinerja, yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel sistem informasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi berdampak baik terhadap akuntabilitas kinerja dinas Pemerintah Kota Ambon. Sistem informasi manajemen memiliki dampak yang dapat diterima terhadap akuntabilitas kinerja entitas Pemerintah Kota Ambon. Temuan penelitian ini mendukung temuan (Astuti, 2008) yang menemukan bahwa sistem informasi berdampak baik terhadap akuntabilitas kinerja. Akibatnya, ketika sistem informasi diimplementasikan dengan lebih baik, akuntabilitas kinerja entitas pemerintah meningkat. Maka untuk mendorong akuntabilitas kinerja diperlukan sistem informasi yang kuat, karena sistem informasi merupakan dasar dalam menentukan sukses tidaknya suatu lembaga. Manajemen sistem informasi manajemen mencerminkan kecenderungan yang menguntungkan menuju akuntabilitas kinerja, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi telah meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa SIM berdampak baik terhadap akuntabilitas kinerja dinas Pemerintah Kota Ambon. Temuan penelitian ini mendukung penelitian (SILVIA, 2013) yang menemukan bahwa SIM memiliki

pengaruh yang cukup baik terhadap akuntabilitas kinerja dinas pemkot Payakumbuh. Kemudian, (Nurkhamid, 2008) menemukan bahwa SIM berdampak baik pada pengembangan sistem pengukuran kinerja, akuntabilitas kinerja, dan penggunaan data kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen manajerial maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Dengan demikian, entitas pemerintah memerlukan keberadaan SIM yang kuat guna meningkatkan akuntabilitas kinerja yang akan dihasilkan. Akibatnya, suatu instansi pemerintah dengan komitmen manajemen yang kuat dari pimpinan dan bawahannya akan lebih mudah mencapai hasil yang maksimal dan memenuhi tujuan penetapan kebijakan.

Menurut temuan investigasi (Ambarwati, 2021), akuntabilitas memiliki dampak yang baik terhadap kinerja organisasi pemerintah. Jika pemerintah benar-benar menerapkan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat, maka akan terbentuk kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat dapat menilai aparatur di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Ambon. Akses publik ke laporan diperlukan untuk akuntabilitas yang efektif. Laporan keuangan yang mudah dibaca dan dipahami. Masyarakat berhak memperoleh informasi keuangan pemerintah untuk menilai pemerintah sebagai pihak yang mempercayai pemerintah dalam mengelola uang rakyat. Akibatnya, akuntabilitas harus didukung oleh teknologi informasi yang tepat, seperti sistem akuntansi yang menghasilkan data yang berkualitas, yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu serta membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang tepat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan temuan kajian mengenai dampak sistem informasi manajemen terhadap akuntabilitas kinerja entitas pemerintah Kota



Ambon, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Sistem Informasi Manajemen memiliki dampak yang menguntungkan terhadap akuntabilitas kinerja dinas Pemerintah Kota Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat sistem informasi manajemen, semakin besar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga dinas Pemerintah Kota Ambon dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Akuntabilitas memiliki dampak yang baik terhadap kinerja organisasi pemerintah. Jika pemerintah benar-benar menerapkan pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat, maka akan terbentuk kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat dapat menilai aparatur di lingkungan Kantor Pemerintah Kota Ambon. Akuntabilitas berarti meminta pertanggungjawaban semua pemangku kepentingan dengan membangun pengawasan bersama. Saling mengawasi dapat terjalin jika transparansi diwujudkan, sehingga semua pemangku kepentingan memiliki pengetahuan yang cukup dan akurat mengenai kebijakan publik dan proses implementasinya

Saran

Pemerintah harus meningkatkan sistem informasi manajemen yang digunakan di lingkungan pemerintahan, khususnya untuk mendapatkan data pengukuran kinerja yang dibutuhkan secara valid, andal, dan tepat waktu, yang berdampak pada optimalnya penyajian dan pelaporan informasi kinerja dari setiap program pemerintah. dan aktivitas. Lebih lanjut, pemerintah harus memperkuat komitmen manajemen dan otoritas pengambilan keputusan agar program-program kegiatan instansi pemerintah dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ambarwati, A. (2021) 'Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi', *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(3), pp. 88–96. Available at: <https://doi.org/10.35134/jbeupiyptk.v6i3.128>.
- [2] Astuti, M.T. (2008) 'Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Individu (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang)', Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang [Preprint].
- [3] Auditya, L., Husaini, H. and Lismawati, L. (2013) 'Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah', *Jurnal Fairness*, 3(1), pp. 21–42.
- [4] Cavalluzzo, K.S. and Ittner, C.D. (2004) 'Implementing performance measurement innovations: evidence from government', *Accounting, organizations and society*, 29(3–4), pp. 243–267.
- [5] Gao, J. (2015) 'Performance Measurement and Management in the Public Sector: Some Lessons from Research Evidence', *Public Administration and Development*, 35(2), pp. 86–96. Available at: <https://doi.org/10.1002/pad.1704>.
- [6] Goodhue, D.L. (1995) 'Understanding user evaluations of information systems', *Management science*, 41(12), pp. 1827–1844.
- [7] Krina, L.L. and Lalolo, L. (2003) 'Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi', Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional [Preprint].
- [8] McLeod Jr, R. and Schell, G.P. (2001) 'Management information System, 5th'. Macmillan Publishing Company, New York.
- [9] Moekijat, M. (2005) 'Manajemen Kepegawaian Dan Hubungan Dalam Perusahaan (Ketiga)', Bandung: Alumni [Preprint].
- [10] Noor, A.S., . J. and Muttaqin, R. (2018) 'Akuntabilitas Sistem Informasi Manajemen Kearsipan dan E-



- Dokumen', JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat), 3(2), pp. 264–271. Available at: <https://doi.org/10.21067/jpm.v3i2.2791>.
- [11] Nurkhamid, M. (2008) 'Implementasi inovasi sistem pengukuran kinerja instansi pemerintah', Jurnal Akuntansi Pemerintah, 3(1), pp. 45–76.
- [12] Nurviasari, R. (2016) 'Pengaruh Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah', Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 5(4), pp. 1–16.
- [13] Rizan Machmud (2013) 'Hubungan Sistem Informasi Manajemen Dan Pelayanan Dengan Kinerja Pegawai Pada Rutan Makassar', Artikel, 1(145), pp. 1907–3313. Available at: <https://repository.ung.ac.id/en/karyailmiah/show/145/hubungan-sistem-informasi-manajemen-dan-pelayanan-dengan-kinerja-pegawai-pada-rutan-makassar.html>.
- [14] Sedarmayanti, G.G. (2003) 'Dalam Rangka Otonomi Daerah', Mandar Maju, Bandung [Preprint].
- [15] SILVIA (2013) Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Dan Otoritas Pengambilan Keputusan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Payakumbuh). Universitas Negeri Padang Wisuda. Available at: <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.
- [16] Wijoyo, H. (2021) Sistem Informai Manajemen, Buku.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN